

BAB II

PEMBELAJARAN BERBASIS MASYARAKAT RUMPUN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Deskripsi Teori

1. Pembelajaran Berbasis Masyarakat (*Community Based Learning*)

a. Konsep Pembelajaran Berbasis Masyarakat

Pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) menurut Suharto (2012: 81) merupakan pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh sekolah dan masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat dengan berorientasi pada masa depan. Adapun pembelajaran berbasis masyarakat menurut Tilaar (2000: 105) adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bersama masyarakat dengan memusatkan diri pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan mendukung kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang melingkupinya.

Sejalan dengan pengertian di atas, pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) menurut Galbraith adalah:

Community based learning could be defined as an educational process by which individuals (in this case adults) become more competent in their skills, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control over local aspects of their communities through democratic participation (Galbraith, 1995: 2).

Menurut Galbraith, pembelajaran berbasis masyarakat didefinisikan sebagai proses pendidikan di mana individu menjadi lebih kompeten dalam hal keterampilan, sikap, dan konsep, sebagai upaya

untuk dapat hidup di dalam masyarakat dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakat tersebut lewat partisipasi demokratis.

Menurut Melaville, pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) ialah:

Community-based learning helps students build a sense of connection to their communities. At the same time, it challenges them to develop a range of intellectual and academic skills in order to understand and take action on the issues they encounter in everyday life. By intentionally linking academic standards to the real world of their communities, community schools are narrowing the gap between knowledge and action and between what students must learn and what they can contribute (Melaville, 1994: 3).

Menurut Melaville pembelajaran berbasis masyarakat membantu peserta didik membangun suatu perasaan untuk berhubungan kepada masyarakat-masyarakatnya. Pada waktu yang sama, hal itu menantang peserta didik mengembangkan bidang intelektual dan keterampilan-keterampilan akademis untuk memahami dari mulai bertindak atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara sengaja menghubungkan standar-standar akademis secara intensif pada dunia nyata dari masyarakat-masyarakatnya, sekolah-sekolah, masyarakat yang mempersempit kesenjangan, celah, jurang antara pengetahuan dan tindakan dan karena peserta didik harus belajar dan apa yang dapat disumbangkannya.

Sedangkan menurut Smit, pembelajaran berbasis masyarakat adalah:

Community based learning is a process designed to enrich the lives of individuals and groups by engaging with people living within a geographical area, or sharing a common interest, to develop voluntarily a range of learning, action, and reflection opportunities, determined by their personal, social, economic and political need (Smit, 2005: 2).

Menurut Smit, pembelajaran berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan

melibatkan mereka tinggal di dalam satu wilayah geografi tertentu, atau berbagi kepentingan bersama, untuk mengembangkan secara sukarela berbagai peluang pembelajaran, tindakan dan refleksi, yang ditentukan oleh kebutuhan pribadi, sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) adalah model penyelenggaraan belajar-mengajar yang melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertujuan agar peserta didik menjadi lebih kompeten dalam hal keterampilan, sikap, dan konsep serta untuk membantu peserta didik dalam mengaplikasikan antara pengetahuan yang diterima di sekolah dengan pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembelajaran berbasis masyarakat diprioritaskan untuk menumbuhkan kompetensi peserta didik untuk mendukung kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Peserta didik bertanggung jawab bagi upaya penyediaan nilai-nilai yang berasal dari proses pembelajaran dan pemecahan masalah yang inheren, atau memiliki *concern* terhadap masyarakatnya (Fajarwati, 2012: 3). Melalui konsep ini peserta didik dan guru merupakan unsur pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran berbasis masyarakat. Para tokoh agama dan masyarakat, komite/pengurus sekolah, orang tua, dan masyarakat merupakan bagian integral dari upaya pengembangan, perencanaan, implementasi, dan penilaian pembelajaran berbasis masyarakat. Kerja sama ini di samping dapat menciptakan keyakinan dan kebersamaan juga dapat menciptakan usaha kolaboratif untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan.

Ada dua hal yang menjadi inti pembelajarn berbasis masyarakat: (a) Pembelajaran dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas individu peserta didik, dari sisi keterampilan, sikap, dan kemampuan konseptual; (b) Masyarakat aktif terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran sesuai kebutuhan pribadi dan sosial masyarakat. Menurut Shumer (1994: 358) program pembelajarn berbasis masyarakat yang diterapkan pada proses pembelajaran di kelas merupakan improvisasi startegi pembelajaran aktif dan alami/kontekstual

Pembelajaran berbasis masyarakat sebenarnya merupakan bagian pengejawentahan dari prinsip relevansi yaitu bagaimana materi program pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masarakat. Upaya melibatkan masyarakat yang dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta orang tua, tokoh agama, pemimpin perusahaan, para pakar, akademisi, dan masyarakat lainnya pada level kebijakan dan level operasional melalui komite, dan keterlibatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas.

b. Dasar Pembelajaran Berbasis Masyarakat (*Community Based Learning*)

1) Dasar Ajaran Islam

Islam menegaskan bahwa pendidikan bagi manusia dilaksanakan untuk mengawal tumbuh kembang manusia sepanjang rentang kehidupannya mulai dari kandungan sampai akhir hayatnya (Muthahhari, 2011: 19). Konsep tersebut secara implisit menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan sebuah entitas yang harus ditransmisikan pada diri peserta didik semenjak dini dalam keseluruhan kehidupannya sehari-hari

baik di rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat. Salah satu misi pendidikan Islam adalah "*transfer of values*" (pengalih nilai-nilai) atau bisa diartikan sebagai "pembudayaan" atau institusional sistem-sistem ajaran Islam. Melalui inilah peserta didik bisa berkomunikasi dengan sesamanya dan memelihara tata kehidupannya dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dikembangkan berhubungan dengan keterampilan personal peserta didik maupun keterampilan sosial peserta didik dengan berbagai strategi pembinaannya.

Menurut ajaran Islam, pendidikan pada dasarnya merupakan proses memanusiakan-manusia (Tafsir, 2013: 87). Pendidikan Islam hadir bukan untuk mengajarkan agama yang teralienasi dari konteks, akan tetapi aktif sebagai penyelesaian problem realitas. Islam hadir untuk selalu mengentaskan manusia dari ber peradaban rendah menuju ber peradaban tinggi.

Agama paling tidak terdiri dari lima dimensi yaitu dimensi ritual, dimensi mistikal, dimensi ideologikal, dimensi intelektual, dan dimensi sosial. Menurut Mortimer (2006: 538-543) dalam *Islam and Power*, dalam agama Islam lebih banyak menekankan dimensi sosial ketimbang dimensi ritual. Dengan demikian dalam Islam peranan masyarakat untuk membina pendidikan agama masyarakatnya sangat penting. Peranan tersebut dilihat dari ke vitalannya dalam membina umat manusia yakni agama memiliki fungsi edukasi, penyelamatan, kontrol sosial, persaudaraan, dan transformasi. Agama dalam fungsi edukasi, yakni agama memiliki peranan untuk membimbing dan mengajarkan manusia melalui lembaga-lembaga pendidikan untuk memahami ajaran agama dan memotivasi manusia untuk membumikan prinsip-prinsip keagamaan dalam setiap sistem perilaku kehidupan fungsi penyelamatan, yakni agama menjadi sumber dari

jawaban terhadap problema manusia. Agama dalam fungsi control sosial, yakni agama ikut bertanggungjawab pada keseimbangan kehidupan manusia.

Agama dalam fungsi transformasi, yaitu menggerakkan dinamika ajaran agama menjadi sebuah kerja kreatif yang selalu kontekstual dengan realitas di mana agama tersebut eksis sehingga agama tidak kehilangan maknanya dalam dimensi yang berbeda. Selain itu, ajaran agama juga mutlak ditransformasikan dalam sendi-sendi kehidupan manusia agar agama tidak selamanya jauh dari realitas dan tidak terjangkau oleh pemahaman manusia (Kuntowijoyo,

Berdasarkan konsep tersebut, peran masyarakat dalam untuk memberikan pendidikan agama pada diri peserta didik di sekolah dimaksudkan agar ajaran agama yang diterima peserta didik tidak jauh dari realitas dan tradisi yang dijalankan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam konteks untuk mewujudkan membumikan tujuan Pendidikan Agama Islam di madrasah, hendaknya madrasah menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran dikemas dalam bentuk pembelajaran berbasis masyarakat, yaitu sebagai bentuk pembelajaran yang melibatkan kebersamaan antara sekolah dan masyarakat. Tentunya semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang ditanamkan kepada peserta didik yakni dengan cara melalui pengajaran, latihan, pembiasaan, dan indotrinasi secara terus menerus sesuai dengan tradisi Islam yang berkembang pada masyarakat, sehingga setiap individu mampu memahami bahwa hubungan kemasyarakatan ada nilai, aturan, dan pedoman yang harus dijaga dan dilestarikan yakni nilai ajaran Islam.

Berdasarkan konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa ada interaksi antara lembaga pendidikan dengan perubahan sosial di masyarakat. Keduanya

saling pengaruh-mempengaruhi, karena lembaga pendidikan merupakan bagian dari dinamika kehidupan di masyarakat. Pendidikan sebagai penggerak perubahan yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal ini ditegaskan Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S. Ar-Ra`du : 11).

Kandungan ayat di atas menurut Aisyah `Abd al-Rahman Bint al-Syathi` (1969 : 108-110) menunjukkan bahwa perbuatan Allah yang berupa mengubah kenikmatan atau apapun yang ada pada suatu kaum mengikuti perbuatan kaum itu yang merupakan pengubahan mereka atas apa yang ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya Machasin menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan ayat ini menunjukkan ada hukum-hukum Allah yang berlaku atas manusia, yakni bahwa sikap yang mereka ambil dan perbuatan yang mereka lakukan mempunyai konsekuensi-konsekuensi pada mereka sendiri. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran dan peradaban manusia merupakan bagian dari usaha manusia dalam mengusahakan pendidikan bagi kemajuan masyarakat dan bangsanya (Machasin, 1996 : 80). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al Hasyr : 18).

2) Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembelajaran berbasis masyarakat dalam pandangan Watson, mencakup tiga elemen dasar yang saling bersinergi bagi terwujudnya pembelajaran berbasis masyarakat yaitu *learning society*, *critical pedagogy*, dan pendidikan berbasis lokal (Suharto, 2012: 98).

Learning society atau masyarakat belajar, merupakan landasan pertama bagi pembelajaran berbasis masyarakat. Asas adanya kepercayaan terhadap masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan menjadi acuan bahwa masyarakat memiliki kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya untuk menyelenggarakan pendidikan (Darling, 2009: 3). Landasan ini berdasar pada kenyataan bahwa setiap warga masyarakat secara sadar selalu menggali potensinya melalui kegiatan belajar sepanjang hayat (*long life learning*).

Masyarakat sesungguhnya punya potensi untuk berkembang, berubah, dan mengatasi masalah yang dihadapi dengan bekal akal pikiran dan sumber daya alam yang dimiliki. Studi perbandingan yang dilakukan Francis Fukuyama (1996: xiv) menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi yang menjadi basis kekuatan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan masih tetap menjadi bagian dari agenda mendasar dalam pembahasan/diskusi untuk meningkatkan taraf hidup dan kemajuan kebudayaan suatu masyarakat. Ketika manusia dilahirkan ke dunia dan berinteraksi dengan manusia yang lain sebenarnya manusia sudah menjadi makhluk yang mengetahui. Pengetahuan

ini dijadikan sebagai bekal untuk bertahan dan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan eksistensial manusia, inilah esensi dari masyarakat belajar.

Masyarakat belajar adalah masyarakat yang menjadikan segala aktivitas hidupnya sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar sehingga membentuk budaya masyarakat belajar. Muara dari *learning society* ini selanjutnya membentuk kualitas jaringan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai timbal balik dan kepercayaan yang menjadi modal masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan melalui bentuk kerjasama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (Abu Bakar, 2008: 266).

Critical paedagogy atau pendidikan kritis, merupakan landasan kedua bagi pembelajaran berbasis masyarakat. Asas ini menekankan adanya gerakan perubahan dan perbaikan dalam budaya masyarakat menuju kemajuan masyarakat itu sendiri. Pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan akan realitas tidak hanya bersifat objektif atau subjektif, tapi harus keduanya secara sinergis. Objektivitas dan subjektivitas dalam pengertian ini menjadi dua hal yang tidak saling bertentangan, bukan suatu dikotomi dalam pengertian psikologis, kesadaran subjektif dan kemampuan objektif adalah dua fungsi dialektis yang konstan/tetap dalam diri manusia (Freire, 1985: x). Pendidikan harus tampil metode yang mengarahkan manusia pada perwujudan kesadaran subjektif yang kritis dan pemahaman akan realitas yang objektif dan akan mengantarkan manusia pada suatu kesadaran kritis yang konstruktif dalam membangun dunianya ke arah yang lebih konstruktif.

Suatu kultur masyarakat digambarkan sebagai perwujudan dari pengalaman hidup, perwujudan dari karya-karya nyata, dan keputusan-keputusan

bersama dari suatu komunitas masyarakat yang di dalamnya terdapat kedekatan hubungan dari berbagai unsur dan struktur sosial masyarakat seperti jenis kelamin, umur, ras dan kelas (Freire, 1985: xxi). Suatu kultur masyarakat yang di dalamnya berbagai unsur saling berinteraksi seperti tokoh pendidikan, organisasi pendidikan, sekolah atau madrasah, guru, peserta didik dan orang tuanya yang merupakan anggota masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya memiliki tanggung jawab dan peranan masing-masing dalam rangka perbaikan dan perubahan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang muncul pada institusi pendidikan sebagai salah satu contohnya.

Solusi yang ditawarkan dari paradigma pendidikan di atas menjadi mendukung pembelajaran berbasis masyarakat (*community base learning*), karena asas pendidikan di atas pada intinya adalah menghendaki perubahan struktur dalam masyarakat di mana pendidikan berada. Sejalan dengan konsep pendidikan kritis tersebut, Zamroni (2007: 352-353) mengungkapkan rasa optimisnya bahwa jalan menuju masyarakat yang maju, modern, dan sejahtera lewat pendidikan dan demokratisasi sangat kompleks dan rumit. Masa depan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Seberapa jauh masyarakat terutama yang berprofesi sebagai pengambil keputusan dan praktisi pendidikan mampu memanfaatkan peluang yang ada, berani mengambil resiko dan konsisten dengan apa yang ditetapkan.

Pendidikan berbasis lokal menjadi landasan filosofis ketiga bagi terselenggaranya pembelajaran berbasis masyarakat. Asas ini berangkat dari kenyataan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berlokasi di masyarakat, diharapkan masyarakat turut ambil bagian dalam merancang, memutuskan, serta

mengatur pendidikan dan model pembelajarannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya (Suharto, 2012: 99-102).

3) Landasan Konseptual

Landasan konseptual pembelajaran berbasis masyarakat merupakan bagian dari demokratisasi pendidikan yaitu merancang program pendidikan “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat” (Zubaedi 2005: 8). Konsep ini menunjukkan masyarakat yang menginisiasi, menyelenggarakan, dan mendapat manfaat dari proses pendidikan. Karena inisiatornya adalah masyarakat maka proses paedagogis yang berlangsung tidak mengabaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Teks normatif yang dipelajari di ruang kelas harus dikaitkan dengan konteks sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan-persoalan sosial harus dibawa ke ruang kelas untuk dipahami, dipelajari, dan dikritisi sebagai pembentukan media pembentukan *critical subjectivity*. Dialektika antara teks dan konteks akan membuat proses pembelajaran lebih berarti. Hasil penelitian Munandar (2002: 188) menunjukkan bahwa masyarakat merupakan sumber penunjang utama, atau setidaknya salah satu dari sumber utama untuk memberikan program pembelajaran dan pengayaan bagi peserta didik, terutama yang memiliki kreativitas dan keberbakatan.

Formulasi konsep pembelajaran berbasis masyarakat yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat” menunjukkan bahwa pembelajaran dari masyarakat artinya pendidikan merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat. Pembelajaran oleh masyarakat artinya masyarakat merupakan subjek pendidikan yang aktif

membantu, bukan sekedar sebagai objek pendidikan sehingga masyarakat betul-betul memiliki, bertanggungjawab dan terlibat dalam proses pembelajaran (Owens, 1996: 4). Pembelajaran untuk masyarakat artinya masyarakat secara aktif terlibat dalam program pembelajaran seperti perencanaan, implementasi, pengelolaan, pemecahan masalah, dan evaluasi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat (Yarbrough, 2014: 31).

4) Landasan Hukum dan Operasionalnya

Rintisan awal pencerahan bagi program pembelajaran berbasis masyarakat yang sebelumnya dirasakan gelap-gulita adalah sejak bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2001, berdasarkan aturan tersebut secara resmi telah diberlakukan otonomi daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan terhadap masyarakat setempat untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian hasil belajar, guru dan kepala sekolah/madrasah, fasilitas dan sarana belajar untuk peserta didik (Muhaimin, dkk., 2009: 1).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut, selanjutnya peran pemerintah dalam hal ini hanya memberikan dukungan dana, fasilitas, dan *ekspertis*. Hal ini dimaksudkan agar terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermanfaat bagi pembangunan kehidupan yang riil di masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat sendiri mengacu pada standar mutu akademik secara nasional atau internasional. Peran pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan tersebut diwakili

oleh Departemen Teknis atau pemerintah daerah (pemda) di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi setempat.

Sejalan dengan pemerintah daerah memberlakukan otonomi pendidikan, pada gilirannya berimplikasi kepada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya pergeseran pola sentralisasi ke desentralisasi berimplikasi dikembangkannya pendidikan demokratis dan non-monopolistik dalam menentukan jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian hasil belajar, fasilitas dan sarana belajar, dan lain-lainnya. Negara-negara di benua Afrika menurut Banoobhai, (2012: 175-179) juga mengembangkan pendidikan demokratis dengan mengembangkan kurikulum inovatif dan kemudian menetapkannya sebagai kurikulum nasional sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di daerah dalam menyusun kurikulumnya sendiri dalam rangka mengatasi berbagai persoalan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Bersamaan dengan otonomi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, manajemen yang dikembangkan lebih mengarah pada manajemen berbasis sekolah atau madrasah yakni model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah atau madrasah. Manajemen tersebut juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, karyawan, dan tokoh agama atau masyarakat untuk meningkatkan mutu madrasah (Muhaimin, dkk., 2010: 2). Selanjutnya melalui implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) inilah pembelajaran berbasis masyarakat dilaksanakan di beberapa sekolah/madrasah di Indonesia.

Landasan hukum pembelajaran berbasis masyarakat terdapat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yaitu:

- a) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya dari oleh dan untuk kepentingan masyarakat
- b) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pandangannya sesuai dengan standar nasional pendidikan
- c) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku
- d) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah (Arifin, 2003: 57-58).

Berdasar landasan hukum pada Undang-Undang Sisdiknas di atas, pembelajaran berbasis masyarakat di Indonesia diterjemahkan secara variatif sehingga diselenggarakan dalam berbagai bentuk seperti :

- a) Pembelajaran yang diselenggarakan oleh pendidikan luar sekolah seperti di pesantren atau LSM.
- b) Pembelajaran yang diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan milik swasta.
- c) Pembelajaran yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah.

- d) Pembelajaran yang diselenggarakan pada pusat kegiatan belajar yang ada di masyarakat.
- e) Pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah swasta/yayasan.

Menurut Miarso, (2007: 631) program pendidikan berbasis masyarakat dapat berbentuk pembelajaran di sekolah menggunakan pendekatan kemasyarakatan (*community based approach*) atau kerjasama dengan tokoh masyarakat sesuai bidang kompetensinya, dengan dasar pertimbangan dan materi pelajaran harus mengikuti aturan baku persekolahan, termasuk kewajiban mengikuti ujian seperti Ujian Akhir Semester, Evaluasi Belajar Tahap Akhir atau Ujian Nasional untuk memperoleh raport atau ijazah.

Berdasarkan konsep tersebut pembelajaran berbasis masyarakat memberikan peluang dan kebebasan yang terkendali kepada masyarakat untuk mendesain, merancang, merencanakan, dan mengelola pembelajaran, serta melakukan evaluasi pendidikan. Jadi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di dalamnya dilaksanakan oleh masyarakat bekerja sama dengan guru bidang studi di sekolah. Dengan proses seperti ini, pendidikan dan pembelajaran diharapkan lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat setempat (Chudolinska, 2014: 1).

c. Tujuan Pembelajaran Berbasis Masyarakat

Setiap kegiatan pembelajaran tentu memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan pembelajaran berbasis masyarakat yaitu :

- 1) Membantu pemerintah dalam mobilisasi sumber daya manusia setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

- 2) Mendorong perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab dan kepemilikan madrasah atau sekolah, seperti tanggung jawab kemitraan, toleransi, dan kesediaan menerima sosial budaya.
- 3) Mendukung inisiatif negara atau pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah atau madrasah, khususnya orang tua dan anggota masyarakat lainnya melalui kebijakan desentralisasi.
- 4) Mendukung peranan masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mensinergikan dengan peran sekolah atau madrasah dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, membuka kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan dan peningkatan efisiensi manajemen pendidikan (Nuryanto, 2008: 316).

Formulasi tujuan pembelajaran berbasis masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas memberikan ciri-ciri khusus pembelajaran berbasis masyarakat. Pembelajaran berbasis masyarakat diarahkan tidak semata-mata memintarkan peserta didik, tetapi juga mencerdaskan. Oleh karena itu pembelajaran berbasis masyarakat memberikan pelayanan proses pembelajaran atau pendidikan kepada masyarakat tidak sebatas pada pengetahuan yang bersifat kognitif saja, akan tetapi melakukan pembelajaran terhadap masyarakat tentang segala aspek kehidupan yang sesuai dengan watak, nilai-nilai agama, dan kebudayaan masyarakat yang melingkupinya.

Pembelajaran berbasis masyarakat mengharuskan pelaksanaan pendidikan tidak jauh dari realitas yang dialami masyarakat, sehingga program pendidikan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di masyarakat mulai dari tingkat perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan untuk menampung aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam menyusun tujuan pendidikan dan pembelajaran yang diinginkan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembelajaran berbasis masyarakat secara umum ditujukan untuk :

- 1) Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan

- 2) Terselenggaranya kerja sama yang saling menguntungkan (saling memberi dan menerima) antara semua pihak yang bekepentingan dengan pendidikan.
- 3) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam (lingkungan), dan sumber daya buatan, seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan termasuk perundangan.
- 4) Meningkatkan kinerja sekolah/madrasah, yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan, serta komitmen dari pelaksana pendidikan (Miarso, 2007: 709).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa inti tujuan pembelajaran berbasis masyarakat ialah proses kesadaran dari hubungan masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan faktor lainnya. Melaksanakan program pembelajaran berbasis masyarakat perlu kesadaran, kepercayaan dan keterlibatan penuh anggota dengan memperhatikan kebebasan, kemampuan dana, dan kesediaan mengambil peranan.

d. Prinsip-prinsip Pembelajaran Berbasis Masyarakat

Pembelajaran berbasis masyarakat pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini dimaksudkan bagaimana materi pelajaran disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Gofur, 2008: 16). Prinsip relevansi ini penting pada pembelajaran berbasis masyarakat, sebab sekolah/madrasah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Oleh karena itu, sekolah atau madrasah dalam menerapkan pembelajaran berbasis masyarakat harus memahami kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat.

Menurut Galbraith, prinsip pembelajaran berbasis masyarakat yaitu:

- 1) *Self determination* (menentukan sendiri), setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengenali sumberdaya masyarakat yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan.
- 2) *Self help* (menolong diri sendiri), anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik dari pada menggantungkan diri, karena mereka beranggapan kesejahteraan adalah tanggungjawab jawab mereka sendiri.
- 3) *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan), pemimpin lokal harus mendapat pelatihan keahlian seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan memandirikan kelompok untuk mengembangkan masyarakat secara berkesinambungan.
- 4) *Localization* (lokalitas), potensi terbesar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan di masyarakatnya.
- 5) *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan), setiap organisasi dalam masyarakat secara bersama-sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
- 6) *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi jasa), masyarakat mengkoordinasikan bentuk pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia untuk menghindari duplikasi jasa.
- 7) *Accept diversity* (menerima keanekaragaman), menghindari pemisahan orang disebabkan perbedaan usia, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnik, agama, dan

ekonomi, yang menyebabkan terhalangnya pengembangan masyarakat secara optimal. Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mungkin agar terlibat dalam pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program pelayanan dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya.

- 8) *Institutional responsiveness* (tanggungjawab kelembagaan), pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik, karena mereka ada untuk melayani orang banyak (masyarakat).
- 9) *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup) atau dalam istilah yang lebih populer disebut *Life Long Education* (pendidikan seumur hidup), peluang belajar secara informal atau formal harus tersedia untuk anggota masyarakat dari berbagai jenis latar belakang (Galbraith, 1995: 5).

Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masyarakat sebagaimana telah dijelaskan di atas untuk melaksanakannya dalam dunia pendidikan atau pembelajaran sebagai berikut :

- 1) Teknologi pembelajaran yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat. Teknologi yang canggih yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah menjadi pengabdian masyarakat yang akibatnya tidak digunakan, sebab kehadiran teknologi ini bukan karena dibutuhkan, melainkan karena dipaksakan. Hal ini membuat masyarakat menjadi rapuh.
- 2) Ada lembaga instansi yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat. Di sini dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan.
- 3) Program belajar yang akan dilakukan harus dinilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh karena itu perencanaannya harus didasarkan pada potensi lingkungan atau berorientasi pasar, bukan berorientasi akademik semata.
- 4) Program belajar harus menjadi milik masyarakat, dan bukan menjadi milik pemerintah. Hal ini perlu ditekankan karena tercermin pada pengalaman selama ini bahwa lembaga pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat memiliki program berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat, dan bukan pemaksaan program dari pemerintah.

- 5) Aparat pelaksana program pembelajaran berbasis masyarakat tidak menangani sendiri programnya, namun bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini yang menjadi pelaksana dan mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dari berbagai jenis latar belakang masyarakat yang ada, dan dalam berhubungan dengan sumber-sumber pendukung program pembelajaran berbasis masyarakat (Zubaedi, 2006: 139-140).

e. Kendala Pembelajaran Berbasis Masyarakat

Prinsip-prinsip yang perlu disadari dari pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat di tingkat normatif tidak selalu sama dengan kenyataan ditingkat empiris. Sagala, dikutip Nuryatno (2008: 316-317), mencatat beberapa kendala dalam mengimplementasi pembelajaran berbasis masyarakat.

1) Kendala Eksternal

Kendala eksternal pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat dapat berasal dari masyarakat, pemerintah, dan para tokoh agama, pemerintahan atau masyarakat.

a) Masyarakat

Kendala pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat yang bersumber dari masyarakat ialah adanya sikap dan pola pikir masyarakat yang masih tertuju pada hal-hal bersifat kebutuhan fisik, adanya budaya menunggu dari masyarakat, dan rendahnya peran dan tanggung jawab masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Selama ini yang tertanam dalam anggapan masyarakat sebagai bentuk kepemilikan dan bantuan masyarakat terhadap sekolah terbatas hanya membantu belajar peserta didik, memenuhi kebutuhan belajarnya, membayar administrasi sekolah, mendatangi rapat, atau ikut serta mencari dana bagi kebutuhan pendidikan sekolah/madrasah. Seharusnya

masyarakat menyadari sebagai bentuk kepemilikan terhadap sekolah diperlukan partisipasi nyata dalam pelibatan menyusun kurikulum, membantu pendanaan sekolah, dan melayani pendidikan sesuai kebutuhan masyarakatnya (Suharto, 2012: vii).

b) Pemerintah

Kendala pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat dari pemerintah adalah adanya sistem *top down* dalam perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut pemerintah, yang berakibat pertanggungjawaban keuangan lebih bersifat teknis daripada substansif. Sistem *top down* menunjukkan masih rendahnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan masyarakat, yang berakibat pada kurangnya inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan program dari bawah.

Sistem perencanaan di atas tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan belajar masyarakat yang sangat beragam. Kendala ini ditambah oleh sikap birokrat yang belum mampu membiasakan diri bertindak untuk melayani kebutuhan masyarakat, tetapi justru bertindak seperti tuan yang berusaha mengatur, memonopoli, dan mendominasi lembaga pendidikan yang aslinya memang milik masyarakat.

Pembelajaran berbasis masyarakat pada hakikatnya merupakan salah satu agenda implementasi demokratisasi pendidikan. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi pendidikan atau pembelajaran berbasis masyarakat. Berdasarkan peran pemerintah ini, hubungan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pembelajaran berbasis masyarakat merupakan hubungan kemitraan, dengan maksud transformasi masyarakat itu sendiri (Suharto, 2012: 142).

c) Para Tokoh agama/masyarakat

Kendala pembelajaran berbasis masyarakat dari para tokoh adalah adanya tokoh-tokoh masyarakat yang seyogyanya berperan sebagai panutan atau contoh teladan namun justru berperilaku seperti tuan yang berusaha mengatur, memonopoli, dan mendominasi lembaga pendidikan. Kendala tersebut ditambah dengan kurangnya kepedulian tokoh masyarakat terhadap pentingnya pembelajaran berbasis masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mengatasi masalah pendidikan dari masyarakatnya.

Kompleksitas permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan realitas dan permasalahan hidup dari waktu ke waktu hendaknya menyadarkan para tokoh agama dan masyarakat bahwa dirinya merupakan personel yang memiliki potensi dan dianggap sebagai tokoh yang dapat memberikan arahan dan kebijakan dalam mengatasi persoalan yang menghimpit masyarakat. Sekolah/lembaga pendidikan merupakan cermin masyarakat, prinsip ini seharusnya menyadarkan tokoh agama/masyarakat bahwa sekolah/lembaga pendidikan harus ikut berperan aktif dalam memecahkan problem sosial. Sebagai konsekuensinya, tokoh agama/masyarakat dituntut untuk lebih berpartisipasi aktif melipatgandakan komitmenn sosiologisnya dalam dunia pendidikan (Zubaedi, 2012: vi).

2) Kendala Internal

Kendala internal pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat dapat berasal dari guru, peserta didik, dan sekolah.

a) Guru

Kendala yang berasal dari guru terkait pembelajaran berbasis masyarakat adalah berkembangnya filosofi bekerja sebagai guru yang hanya selesai setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Tugas guru bukan selesai pada saat guru telah memenuhi tugas dan jam wajib masuk kelas, tetapi ada tugas lain seperti keterlibatan guru dalam evaluasi kurikulum, bahkan perumusan kurikulum operasional setelah mengakses permintaan-permintaan dari masyarakat terkait kebutuhan dan masalah pendidikan yang muncul di masyarakat, atau mengakses permintaan dari *stakeholder* dan user dari pendidikan tersebut (Rosyada, 2007: 14).

Kendala lainnya adalah terkait kompetensi profesional yang harus dimiliki guru untuk menyelenggarakan pembelajaran juga mewarnai fenomena pembelajaran berbasis masyarakat. Menjadi guru profesional diperlukan empat kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai yaitu kompetensi profesional, pedagogik, personal dan sosial (Mulyasa, 2007: 5). Terkait persyaratan menjadi guru tersebut, tentunya pihak madrasah sulit mencari tokoh agama/masyarakat dengan empat kompetensi tersebut untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis masyarakat. Persyaratan ini tentunya dapat menghambat pembelajaran berbasis masyarakat, karena pada realitasnya mencari standar persyaratan tersebut terutama faktor ijazah masih menjadi masalah tersendiri bagi sekolah dan masyarakat. Hal ini disebabkan tokoh agama/masyarakat dalam lingkup madrasah masih didominasi pendidikan dari pesantren, seperti pengasuh pondok pesantren, modin, dan mubaligh yang tidak memiliki kualifikasi sertifikat pendidik dari perguruan tinggi berbasis pendidikan.

b) Peserta Didik

Kendala internal terkait pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat juga berasal dari peserta didik. Peserta didik yang sudah terbiasa dalam setting pembelajaran pada sekolah kurang demokratis, memiliki peran dan tugas-tugas belajar yang sedikit. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran dan tugas-tugas belajar sesuai materi pada silabus yang terkesan lebih dominan pada aspek kognitif.

Melalui penerapan pembelajaran berbasis masyarakat yang memerlukan demokratisasi pembelajaran, peserta didik dituntut memiliki partisipasi yang lebih luas dalam lingkup materi sekolah dan masyarakat. Kreativitas dan keaktifan peserta didik mengaitkan materi pelajaran dengan dunia nyata melalui penelitian, pengalaman, pemecahan masalah, dan penemuan tentunya dirasa memberatkan peserta didik dalam belajar (Rosyada, 2007: xiv). Selain itu pelaksanaan dan metode pembelajaran berbasis masyarakat lebih banyak disetting di luar kelas sehingga kompetensi yang harus dikuasai peserta didik mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan konsep belajar dan penerapan model pembelajaran tersebut tentunya menjadi kendala sendiri bagi peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat.

c) Sekolah

Pembelajaran berbasis masyarakat merupakan wujud demokratisasi pendidikan yang di dalamnya juga menuntut demokratisasi manajerial, kurikulum, dan pengelolaan pembelajaran (Rosyada, 2007: xiii). Pada kasus sekolah yang umumnya dikelola secara otokratis atau dikelola secara sentralistis, dan kurang aspiratif atau kurang pelibatan mitra horizontal sekolah

tentunya akan menjadi penghambat utama program pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*). Usulan-usulan kreatif guru atau tokoh masyarakat, atau suara masyarakat terkait kebijakan dan masalah pendidikan akan selalu tersandung oleh aturan-aturan birokrasi sekolah dan kekuatan vertikal yang diberlakukan di sekolah tersebut.

Berdasarkan kendala yang telah diungkapkan di atas, diperlukan demokratisasi kurikulum dan pembelajaran yang dimbangi demokratisasi pengelolaan manajerial sekolah/madrasah. Dengan melibatkan seluruh unsur-unsur dalam organisasi sekolah atau madrasah tersebut, bahkan dalam batas-batas tertentu juga harus melibatkan *client* dan *user* sekolah atau madrasah, khususnya dalam evaluasi, pengembangan kurikulum, dan upaya-upaya mengimplementasikan berbagai program dan gagasan cerdas pengembangan sekolah/madrasah terutama dalam implementasi pembelajaran berbasis masyarakat. Berdasarkan identifikasi terhadap kemungkinan kendala-kendala internal dan eksternal yang muncul, menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis masyarakat di lapangan tidak selalu berjalan mulus, dan selalu ada kendala dan rintangan. Konsep implementasi pembelajaran berbasis masyarakat di sekolah/madrasah terkadang tidak berjalan beriringan.

Pembelajaran berbasis masyarakat berdampak signifikan jika kendala eksternal dan internal dapat diatasi dan diantisipasi. Hal itu bisa terwujud jika ada kesadaran bersama dan sinergi antara sekolah/madrasah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam mengaplikasikan konsep pembelajaran berbasis masyarakat di tingkat praktis, salah satunya adalah seperti melibatkan masyarakat pada pembelajaran rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah.

2. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Abdurrahman dalam Tohirin (2006 : 8) merumuskan bahwa pendidikan agama Islam adalah penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan menerapkan secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Pengertian pendidikan agama Islam menurut definisi Depdiknas adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam menjalankan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, serta penggunaan pengalaman (Hidayat, 2007 : 2).

Sejalan dengan pengertian di atas, Zuharini (2000: 11) mendefinisikan pendidikan agama Islam sebagai usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik supaya kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai *way of life* (jalan kehidupan).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan agama Islam merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengajarkan kepada pesera didik agar menjadi manusia yang dapat hidup

dengan baik dan dapat membina hubungan yang selaras dan seimbang baik secara vertikal maupun horizontal.

Proses belajar pendidikan agama Islam tidak terlepas dari aktivitas pembelajaran di sekolah atau madrasah. Mengajar pendidikan agama Islam pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran sehingga tercipta tata kelola kelas yang baik dan situasi belajar untuk peserta didik. Semua itu diwujudkan untuk melahirkan nilai dan interaksi edukatif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.

b. Dasar Pendidikan Agama Islam

1) Dasar Filosofis

Adapun dasar filosofis pelaksanaan bimbingan guru di sekolah cenderung berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hakikat manusia, hakikat cinta kasih, dan hakikat pendidik itu sendiri. Tanpa memahami filsafat tentang manusia, cinta kasih, dan pendidik, pelaksanaan layanan bimbingan yang dilakukan guru akan menjadi tidak optimal hasilnya. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan bimbingan harus memperhatikan landasan filosofis secara sungguh-sungguh tentang hakikat manusia di bawah ini :

- a) Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya.

- b) Manusia dapat belajar mengatasi masalah yang dihadapinya apabila berusaha memanfaatkan kemampuan yang ada pada dirinya.
- c) Manusia berusaha terus-menerus mengembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan.
- d) Manusia dilahirkan dengan potensi untuk baik dan buruk. Hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidaknya mengontrol keburukan.
- e) Manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam.
- f) Manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya. Kebahagiaan manusia terwujud melalui pemenuhan terhadap tugas-tugas kehidupannya.
- g) Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan yang menyangkut peri kehidupannya sendiri (Muthahhari, 2011: 37).
- h) Manusia adalah unik, manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu dan akan menjadi apa manusia itu.
- i) Manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu.
- j) Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tua atau gurunya yang menentukan apakah manusia kecil itu nantinya beragama Islam, Yahudi, Nasrani, atau Majusi (Sutirna, 2013: 37).

Pemahaman terhadap hakikat manusia di atas, diharapkan setiap upaya pendidikan atau bimbingan guru pendidikan agama Islam tidak menyimpang dari hakikat tentang manusia itu sendiri. Guru pendidikan agama Islam dalam berinteraksi dengan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran harus mampu melihat dan memperlakukannya sebagai sosok utuh manusia dengan berbagai dimensi dan keunikannya.

2) Dasar Psikologis

Peserta didik merupakan amanah Allah SWT. yang lahir dengan fitrah kesucian. Lingkungan keluarga dan sekolah yang mempengaruhi dan membentuk kepribadiannya. Kecenderungan peserta didik sesuai yang dilukiskan dan cenderung kepada sesuatu yang diarahkan kepadanya. Jika peserta didik dibiasakan belajar secara baik, mereka akan tumbuh menjadi baik dan jika dibiasakan belajar melakukan keburukan, mereka menjadi rusak kepribadiannya.

Guru berpeluang besar untuk membentuk karakteristik agama atau akhlak peserta didik. Peserta didik yang lahir dalam keadaan fitrah dapat saja berubah, merupakan tanggung jawab guru pendidikan agama Islam untuk mendidiknya agar pertumbuhan kepribadiannya tidak menyimpang dari fitrah Islami. Sehubungan fenomena tersebut, guru pendidikan agama Islam harus lebih memperdulikan pendidikan bagi peserta didiknya melalui pola asuh atau model pembelajaran pendidikan agama Islam yang selaras dengan tradisi keagamaan yang hidup pada keluarga dan masyarakatnya. Model pendidikan agama Islam ini telah ditekankan Allah SWT. dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An-Nahl :125). (Soenarjo, 2003: 421).

Kehidupan dan peradaban manusia selalu mengalami perubahan. Merespon fenomena tersebut, manusia harus berpacu mengembangkan potensi dasarnya melalui belajar dan peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penyempurnaan model belajar pendidikan agama Islam sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan diterapkan pada masyarakatnya, hal ini dimaksudkan agar output pendidikan agama Islam di madrasah tidak terasing dengan konteksnya. Kebutuhan masyarakat terhadap output pendidikan agama Islam yang membumi pada masyarakatnya sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis dan mampu bersaing di era post modern ini merupakan suatu keharusan.

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Secara umum tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia (Hidayat, 2007 : 2). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Athiyah (2004 : 27) yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam bukanlah memenuhi otak peserta didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, melainkan:

- 1) Mendidik akhlak dan jiwa mereka
- 2) Menanamkan rasa keutamaan
- 3) Membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi (fadhilah)
- 4) Membiasakan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.

Pendapat yang snada juga dikemukakan oleh Junaidi (2001 : 199) bahwa tujuan pendidikan agama Islam yaitu membentuk manusia yang baik yaitu manusia yang beribadah kepada Allah. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya perhatian khusus dari lingkungan di sekitar peserta didik terutama guru agama. Zakiyah Darajat (2004 :16) menyatakan guru agama mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu ikut membina pribadi peserta didik disamping mengajarkan pengetahuan agama kepada peserta didik. Guru agama harus memperbaiki pribadi peserta didik yang telah terlanjur rusak, karena pendidikan dalam keluarga. Guru agama harus membawa peserta didik semuanya ke arah pembinaan pribadi yang sehat dan baik. Setiap guru agama harus menyadari, bahwa segala sesuatu pada dirinya akan merupakan unsur pembinaan bagi peserta didik.

d. Evaluasi Belajar Pendidikan Agama Islam

Secara umum sistem evaluasi adalah metode penilaian yaitu memberikan keputusan tentang nilai sesuatu untuk tujuan-tujuan tertentu. Sesuatu dapat berupa gagasan, cara kerja, pemecahan, metode, materi dan lainnya. Tujuan-tujuan tertentu menuntut penggunaan kriteria atau standart tertentu (Sudijono, 2008: 3). Yang dimaksud sistem evaluasi pendidikan agama Islam ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di

dalam pendidikan agama Islam. Evaluasi adalah alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap pendidikan yang telah diberikan.

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pendidikan agama Islam mencakup penilaian terhadap kemajuan belajar (hasil belajar) peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesudah mengikuti program pengajaran. Di dalam pendidikan agama Islam sebagai suatu “sistem evaluasi” bukanlah suatu pekerjaan tambal sulam, tetapi evaluasi merupakan salah satu komponen, di samping materi/bahan, kegiatan belajar mengajar, alat pelajaran, sumber dan metode yang kesemua komponen saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.

Bagaimana baiknya tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, akan tetapi bila tidak disertai materi pelajaran yang sesuai dengan metode yang tepat, alat pelajaran yang memadai, prosedur evaluasi yang mantap, maka tipis kemungkinan tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Dari uraian tersebut dapat dijabarkan bahwa :

- 1) Secara Micro evaluasi pendidikan agama Islam adalah perkembangan dan kemajuan siswa yang berupa pengetahuan sikap dan kecakapan bertindak mengenai pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan pada Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) pendidikan agama.
- 2) Secara Macro evaluasi seperti di atas tersebut mengandung pengertian di samping menilai pihak peserta didik sebenarnya juga menilai pihak guru dan program pendidikan pengajaran agama itu sendiri.

Evaluasi pendidikan agama itu seharusnya terorganisasikan dalam sistem yang tersusun dari :

- 1) Subjek (pelaku) pendidikan/pengajaran yaitu guru dan peserta didik.
- 2) Tujuan.
- 3) Materi.
- 4) Alat dan Metode.
- 5) Evaluasi (Zuhairini, 2000: 146).

Oleh karena itu agar tujuan pendidikan agama Islam dapat tercapai sebaik-baiknya, maka setiap kegiatan pendidikan pengajaran agama tidak boleh mengabaikan unsur evaluasi hasil belajar. Evaluasi ditempatkan terakhir (tingkat keenam) dalam domain kognitif, karena melibatkan semua tipe hasil belajar terdahulu. Walaupun demikian, evaluasi bukan merupakan langkah terakhir dalam berfikir atau memecahkan masalah.

Berdasarkan kriteria yang digunakan, dikenal ada evaluasi dengan kriteria internal, seperti ketetapan (*accuracy*) dan konsistensi, dan evaluasi dengan kriteria eksternal, seperti sudut pandang tertentu, karya tertentu, kriteria tertentu dan sebagainya. Sistem evaluasi pendidikan agama Islam yang dimaksud di sini ialah prinsip-prinsip evaluasi yang perlu dipegangi, dan cara-cara evaluasi yang perlu ditempuh dalam proses pendidikan (dalam menjalankan program kurikulum yang ditetapkan), guna mengetahui keberhasilan pendidikan agama Islam yang telah dilakukan.

e. Pengukuran Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam

Masalah belajar merupakan masalah yang cukup urgen dalam kehidupan manusia karena tanpa melalui aktivitas belajar, seseorang tidak akan pernah mengalami kemajuan dan hampir semua perubahan dan perkembangan dinamika kehidupan manusia terbentuk oleh adanya proses belajar. Proses

belajar merupakan perubahan yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010:2).

Prestasi belajar yang dicapai peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri maupun luar diri peserta didik (Ahmadi, 2008: 138). Prestasi belajar merupakan suatu hasil yang dicapai peserta didik melalui hasil pengamatan, hasil diskusi, maupun hasil akhir dari proses pembelajaran, yang biasanya dinilai oleh guru pada proses atau akhir pengajaran. Keberhasilan proses belajar peserta didik ini menurut Sudjana (2009: 27) tampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh (komprehensif) yang terdiri atas unsur kognitif, efektif, dan psikomotorik secara terpadu pada diri peserta didik. Berdasarkan konsep tersebut, Mustaqim (2001: 130) merumuskan pengertian prestasi belajar sebagai bentuk pengukuran dan penilaian sebagai usaha dari guru untuk mengetahui hasil yang telah dicapai peserta didik dengan kemampuan atau potensi dirinya seperti kecerdasan atau perbuatan yang mencerminkan penerimaan dan pemahaman terhadap materi yang diberikan.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan kompetensi yang dicapai/ditunjukkan oleh peserta didik sebagai hasil belajarnya yang diperoleh setelah melalui kegiatan belajar. Hal ini bisa merupakan huruf, angka, serta tindakan yang dicapai peserta didik pada masa tertentu, dimana dapat tercapai apabila diusahakan secara maksimal, melalui latihan maupun pengalaman, untuk mencapai hal itu harus dimulai dari diri sendiri.

Konsep di atas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa prestasi belajar pendidikan agama Islam merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik

sebagai hasil pengalaman yang dilakukannya secara sengaja dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Prestasi belajar dilembaga pendidikan yang formal dinyatakan pada bentuk angka-angka (pada nilai harian atau nilai raport) sebagai hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dari gambaran ini sudah jelas bahwa nilai raport yang di peroleh peserta didik tidak semata-mata ditinjau dari hasil ulangan-ulangan atau tes yang dilakukan pada waktu tertentu, tetapi diperoleh dari semua kemampuan semua yang dievaluasi secara terus menerus. Dari kegiatan evaluasi dapat diperoleh gambaran yang jelas dari perubahan tingkah laku peserta didik kearah lebih positif.

Seorang guru perlu memahami tugas guru dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik, sehingga hal ini dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan. Agar tercapai tujuan pendidikan dimaksud, Adisusilo (2013: 234) menyarankan agar seorang guru perlu bertindak secara aktif dalam membantu setiap langkah dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya dalam proses penilaian terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik, biasanya mengacu pada tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor. Dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) pendidikan agama Islam biasanya aspek kognitif selalu diutamakan, bahkan kadang-kadang terdapat praktik-praktik yang menunjang kognitif saja yang berlaku. Tujuan pembelajaran kerap mengandung sasaran supaya peserta didik belajar berpikir kognitif (*how to think*) merupakan faktor yang penting pada kegiatan belajar peserta didik (Majid, 2007: 74).

Menurut Purwanto (2006: 85) belajar merupakan suatu proses, sudah tentu harus ada yang diproses dan hasilnya. kegiatan belajar dapat menganalisis dengan pendekatan analisis sistem. Dengan pendekatan sistem, dapat dilihat adanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil atau prestasi belajar peserta didik.

Prestasi belajar yang nampak dari kemampuan peserta didik dilihat melalui lima kategori, yaitu keterampilan intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap (Uno, 2012: 120). Menurut Uno, kategori prestasi belajar ada tiga ranah atau kawasan, yaitu : Ranah kognitif (*cognitive domain*), ranah afektif (*afective domain*) dan ranah psikomotorik (*motor skill domain*) (Uno, 2012: 120). Kawasan kognitif mengacu pada respons intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah Afektif mengacu pada respons sikap. Sedangkan ranah psikomotorik mengacu perbuatan fisik atau keterampilan atau pengamalan.

Penilaian terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik sangat penting kedudukannya untuk mengevaluasi keberhasilan belajar mengajar.

Berikut ini dikemukakan fungsi penilaian:

- 1) Penilaian berfungsi selektif (fungsi sumatif), fungsi penilaian ini ialah untuk pengukuran akhir dalam suatu program pembelajaran dan hasilnya dipakai untuk menentukan apakah peserta didik dapat dinyatakan lulus atau tidak dalam program pendidikan tersebut. Penilaian berfungsi untuk membantu guru mengadakan seleksi terhadap beberapa peserta didik (Purwanto, 2006: 26).
- 2) Penilaian berfungsi diagnostik, fungsi diagnostik penilaian ini mengetahui kesulitan peserta didik terhadap masalah-masalah belajar, sehingga dengan adanya penilaian dalam proses pembelajaran, guru dapat merancang

pembelajaran untuk mengatasi kesulitan dan kelemahan serta pemecahan masalah (Hamalik, 2007: 147).

- 3) Penilaian berfungsi sebagai penempatan (*placement*), penilaian dilakukan untuk mengetahui di mana seharusnya peserta didik ditempatkan sesuai kemampuannya yang telah diperlihatkannya pada prestasi belajar yang telah dicapainya (Azwar, 2008: 11).
- 4) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan (fungsi formatif), untuk mengetahui sejauh mana suatu program dapat diterapkan (Azwar, 2008: 11). Contoh raport di setiap semester di sekolah/madrasah tingkat dasar dan menengah dapat dipakai untuk mengetahui apakah program pendidikan yang telah diterapkan berhasil.

e. Komponen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Surachmad (2004: 16) menerangkan bahwa dalam suatu kegiatan pembelajaran di kelas yang efektif dan bernilai normatif, maka kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada tujuan yang jelas yang akan dicapai
- 2) Ada bahan yang menjadi isi interaksi
- 3) Ada pelajar yang aktif mengalami
- 4) Ada guru yang melaksanakan
- 5) Ada metoda tertentu untuk mencapai tujuan
- 6) Ada situasi yang subur, yang memungkinkan proses interaksi berlangsung dengan baik
- 7) Ada penilaian terhadap hasil interaksi itu.

Sebagai suatu sistem tentu pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah mengandung sejumlah komponen. Menurut Djamarah (2008: 17-20) komponen-komponen pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut meliputi:

1) Tujuan

Kegiatan interaksi edukatif tidaklah dilakukan secara serampangan dan di luar kesadaran. Kegiatan interaksi edukatif adalah suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh guru. Atas dasar kesadaran itulah guru melakukan kegiatan pembuatan program pengajaran, dengan prosedur dan langkah-langkah sistematis.

2) Bahan Pelajaran

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Bahan pelajaran itu yang dipelajari dan dikuasai peserta didik dengan baik. Pengalaman belajar peserta didik harus mengandung bahan pelajaran. Isi bahan pelajaran harus berkaitan erat dengan tujuan belajar yang mencukupi kebutuhan peserta didik. Bahan pelajaran ini harus dipersiapkan oleh peserta didik, agar proses belajar tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan.

3) Kegiatan belajar mengajar

Kegiatan belajar merupakan inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pengelolaan pengajaran dan pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan oleh guru adalah perbedaan anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis.

4) Metode

Metode adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soetomo, menjelaskan bahwa metode belajar dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar yang ingin dicapai, sehingga semakin baik penggunaan metode belajar semakin berhasillah pencapaian tujuan, artinya apabila peserta didik atau anak dapat memilih metode yang tepat yang disesuaikan dengan bahan pengajaran, karakteristik anak, situasi kondisi, media pengajaran semakin berhasillah tujuan belajar yang ingin dicapai (Soetomo, 2003: 144).

5) Alat

Alat adalah sesuatu yang digunakan mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam kegiatan interaksi edukatif biasanya dipergunakan alat nonmaterial dan alat material. Alat nonmaterial berupa suruhan, perintah, larangan, nasehat, dan sebagainya. Sedangkan alat material atau alat bantu pengajaran berupa globe, papan tulis, batu, kapur, gambar, diagram, lukisan, slide, video, dan sebagainya. Alat bantu material ini juga disebut media pembelajaran.

6) Sumber pelajaran

Proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah tidak berproses dalam kehampaan, tetapi pembelajaran tersebut berproses pada kemaknaan. Di dalamnya ada sejumlah nilai yang disampaikan kepada peserta didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi diambil dari berbagai sumber guna dipakai dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam.

7) Evaluasi Terhadap Hasil Belajar

Sejumlah tokoh pendidikan yakin sebagian besar peserta didik sanggup menguasai bahan pelajaran sepenuhnya dengan syarat tertentu. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi prestasi belajar sehingga tercapai penguasaan penuh (Nasution, 2005: 38-49).

f. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup pendidikan agama Islam teraktualisasi dalam Kurikulum pendidikan agama, dan secara umum terangkum dalam Peraturan Pemerintah No 19 pasal 5 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dijelaskan bahwa pendidikan agama harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kurikulum Pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Pendidikan agama diajarkan sesuai tahap perkembangan kejiwaan siswa.
- 3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- 5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.
- 6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses (Arifin, 2003 : 4).

Mencermati hal tersebut maka dalam ruang lingkupnya pendidikan agama Islam diberikan pada sekolah umum dan sekolah agama (sekolah) negeri maupun swasta. Seluruh pendidikan yang diberikan di sekolah atau madrasah diorganisasikan dalam bentuk kelompok-kelompok mata pelajaran yang disebut bidang studi dan dilaksanakan melalui sistem kelas.

Dalam program sekolah umum, pengajaran dan pendidikan agama Islam meliputi 7 unsur/materi pokok yaitu: al-Quran, Hadist, Keimanan, Akhlak, bimbingan Ibadah, syari'ah/Fiqih, Baca Tulis al-Quran, Bahasa Arab, dan Sejarah Islam. Hal tersebut merupakan perwujudan dari keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainya maupun lingkungannya.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sejauh ini ada beberapa tulisan mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat yang sudah terbit, baik dalam bentuk buku, hasil penelitian, maupun artikel. Namun, tulisan mengenai Pembelajaran Berbasis Masyarakat yang berkenaan dengan penerapannya pada pembelajaran di kelas secara utuh dan komprehensif belum ditemukan. Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran hasil kajian yang dilakukan beberapa peneliti terkait pembelajaran berbasis masyarakat. Kajian terhadap hasil penelitian ini memperjelas posisi peneliti terkait kegiatan penelitian ini berkenaan dengan objek utama kajian.

Penelitian yang dilakukan Finta Eva Fitriyani, NIM. 3103029, tahun 2008, mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, berjudul “*Penerapan Pendidikan Agama Islam Berbasis Komunitas (Studi Kasus di SMP Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga)*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mengkaji tentang penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan agama Islam adalah dengan mengintegrasikan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum. Penerapan pendidikan agama Islam berbasis masyarakat diwujudkan dengan penciptaan suasana yang religius di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di sekolah peserta didik menggalang berdirinya organisasi Kerohanian Islam (Rohis) sebagai forum untuk memecahkan masalah tentang keagamaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat penerapan pendidikan agama Islam dalam bentuk organisasi remaja masjid dan perkumpulan remaja lainnya sebagai bentuk partisipasi remaja dalam mengembangkan potensi sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Fitriyani, 2008: vii-viii).

Tesis karya Moh. Hasyim, NIM. 1103504040, tahun 2007, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang, dengan judul “*Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (Case Study Pelaksanaan Proses Pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga)*”. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan memfokuskan pada permasalahan bagaimana implementasi pendidikan berbasis masyarakat di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah terutama pada aspek proses pembelajaran dan pengelolaan komponen pembelajaran. Sumber

data penelitian ini diambil pada aspek proses pembelajaran dan pengelolaan komponen pembelajaran. Selain itu data diperoleh dari wawancara dengan narasumber sebagai informan kunci yang ditentukan secara *purposive-sampling*. Analisis data dikembangkan pada proses triangulasi yang ditunjang oleh data observasi dan telaah terhadap dokumen. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai proses pengujian keabsahan data dalam proses verifikasi. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh SLTP Aternatif Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga memberikan implikasi luas tidak hanya pada perubahan pola belajar peserta didik, akan tetapi juga mampu mempengaruhi paradigma guru dalam mengajar dan budaya masyarakat setempat. Kondisi ini terjadi karena proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual mampu menciptakan hubungan harmonis antara sekolah, masyarakat dan lingkungan alam (Hasim, 2007: viii).

Ahmad Bahruddin, "*Pendidikan Alternatif Qaryah Thayyibah*" yang diterbitkan LKIS Yogyakarta tahun 2007. Buku ini memaparkan implementasi pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) di SMP Alternatif Qaryah Toyiybah Kalibening Salatiga. Buku setebal 286 halaman ini ditulis sendiri oleh pendiri sekolah ini. Secara garis besar isi buku merupakan kajian penulis selama mengelola sekolah ini, mulai dari pendirian sekolah, kerjasama lembaga terkait seperti dinas pendidikan, tokoh masyarakat, implemementasi pendidikan berbasis masyarakat, prestasi sekolah, kendala pengelolaan, sampai pada upaya internasionalisasi sekolah alternatif ini dipentas dunia. Walhasil, sampai detik ini melalui kerjasama yang *apik* dengan dinas pendidikan, SMP Qariyah Tayyibah mampu sejajar dengan tujuh keajaiban dunia lainnya. Sebagai

konsekwensinya banyak praktisi pendidikan, peneliti, lembaga pendidikan, dan mahasiswa turut ambil bagian *ngangsu kaweruh* di sekolah ini (Bahrudin, 2007).

Kemudian sebuah penelitian yang dilakukan oleh Toto Suharto, 2012, mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul : *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Relasi Negera dan Masyarakat dalam Pendidikan*. Secara garis besar Disertasi ini merupakan hasil penelitian literer atau kajian pustaka. Sumber data diambil dari buku-buku dan tulisan terkait tentang pendidikan kritis dan pendidikan berbasis masyarakat. Analisis menggunakan analisis *content* atau analisis isi yang dihubungkan dengan analisis fenomenologi. Dari hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kritis merupakan ide munculnya pendidikan berbasis masyarakat. Gugusan pemikiran Toto Suharto pengarang buku ini memandang masyarakat memiliki sumberdaya untuk membangun infrastruktur masyarakatnya melalui jalur pendidikan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap kebijakan pemerintah yang dirasakan mengekang partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Tokoh pendidikan kritis seperti Paulo Freire, nampaknya menjadi ikon untuk mengembangkan sayap pemikiran Toto Suharto dalam analisis Disertasinya. Disertasi ini telah diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta menjadi sebuah buku kecil dengan ide-ide segar yang laris di pasaran (Suharto, 2012).

Penelitian yang dilakukan Noor Aziz, Dosen Fakultas Tarbiyah Uniersitas Sains al-Quran (UNSIQ) Wonosobo, yang dimuat pada Jurnal Kependidikan Al-Qalam edisi 13 Tahun 2014 tentang “*Pengembangan Pendidikan Alternatif Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di SMP Qariyah Tayyibah Salatiga)*”. Penelitian studi kasus ini Noor Aziz menawarkan konsep

pendidikan berbasis masyarakat untuk menjembatani berbagai persoalan modern pendidikan agama di Indonesia yang mengalami krisis multi dimensi. Noor Aziz, memilih SMP Alternatif Qaryah Tayyibah Kalibening Salatiga, sebagai ikon penelitiannya yang memotret keberhasilan lembaga pendidikan ini dalam menerapkan pendidikan berbasis masyarakat sehingga mampu mengorbit ke belahan dunia sejajar dengan tujuh keajaiban dunia (Aziz, 2014: 211-224).

Hasil penelitian kolaboratif yang ditulis oleh Dian Fajarwati, Ahmad Sopyan, dan Samsudi, yang berjudul “*Implementasi Pembelajaran Berbasis Masyarakat (Community Based Learning) Mata Pelajaran Ibadah SMP Muhammadiyah di Kabupaten Kendal*” yang diterbitkan *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology*, juga mendukung gagasan pembelajaran berbasis masyarakat. Penelitian komparasi ini menggunakan pendekatan studi kasus tentang perbandingan penerapan pembelajaran berbasis masyarakat pada mata pelajaran ibadah di SMP Muhammadiyah 2 Boja, SMP Muhammadiyah 11 Rowosari, dan SMP Muhammadiyah 4 Sukorejo Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prinsip sekolah-sekolah SMP Muhammadiyah Kendal menerapkan pembelajaran berbasis masyarakat dan secara teknis implementasinya berbeda antara sekolah satu dengan lainnya, seperti dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya masing-masing sekolah tidak melaksanakan salah satu komponen tersebut (Fajarwati, Sopyan, Samsudi, 2012: 1-7).

Penelitian di atas memiliki kesamaan pada kajian pendidikan atau pembelajaran berbasis masyarakat dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun pada penelitian ini, peneliti lebih spesifik mengkaji pada penerapan

pembelajaran berbasis masyarakat pada mata pelajaran Fiqh dan al-Quran Hadits di MTs NU 07 Patebon yang memiliki latar belakang sosial, religiuitas, kelembagaan, dan masyarakat yang berbeda dengan objek penelitian di atas. Penelitian yang dilakukan Dian Fajarwati dkk, pada jurnal penelitian adalah penelitian komparatif, meskipun di wilayah Kabupaten Kendal namun hanya mengkaji pada pembelajaran ibadah, dan cakupan kajiannya masih belum mengkaji secara holistik dan komprehensif tentang pembelajaran berbasis masyarakat pada mata pelajaran ibadah. Penelitian di atas penulis jadikan sebagai pendukung dalam membangun kerangka teoritik pada penelitian ini.

C. Kerangka Berpikir

Rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah mata pelajaran Al-Quran Hadist, Akidah Akhlak, Fiqh, Bahasa Arab, dan Tarikh atau Sejarah Kebudayaan Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan. Adapun rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada penelitian ini hanya dibatasi pada mata pelajaran Fiqh dan al-Quran Hadits.

Langkah-langkah pembelajaran berbasis masyarakat sebagai berikut:

a) Pemetaan Kompetensi Dasar; b) Menetapkan Materi Pelajaran; c) Penyusunan Silabus; dan d) Penyusunan Rencana Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran setiap hari dilakukan menggunakan tiga tahapan kegiatan yaitu kegiatan pembukaan atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Penjadwalan dimaksudkan memudahkan administrasi sekolah. Penjadwalan biasanya disusun oleh Wakaur Kurikulum atas pertimbangan dari Dewan Guru.

Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan belajar. Alat penilaian dapat berupa Tes dan Non Tes. Tes mencakup: tertulis, lisan, atau perbuatan, catatan harian perkembangan peserta didik, dan portofolio. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas penilaian yang lebih banyak digunakan adalah melalui praktik membaca bacaan shalat, menghafal dan pemahaman (praktik).

Pada pembelajaran berbasis masyarakat, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian Kompetensi Dasar dan Indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Nilai akhir pada raport didasarkan pada aspek penguasaan konsep, membaca, menghafal, dan penerapan (praktik).

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara (metode/strategi) yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah atau madrasah. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Makna dari pembelajaran berbasis masyarakat di sekolah/madrasah adalah tumbuhnya kesadaran dalam diri peserta didik untuk melaksanakan

ibadah sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini berkaitan dengan penguasaan kebiasaan, pengetahuan dan perilaku. Ini memungkinkan individu untuk membentuk penyesuaian pribadi dan sosial. Karena konsep perubahan sejalan dengan konsep pembelajaran, setiap perubahan dalam perilaku berarti bahwa pembelajaran sedang terjadi. Pembelajaran yang terjadi selama proses perubahan bisa disebut proses pembelajaran.

Dampak pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) antara lain adalah peserta didik memiliki penguasaan kompetensi yang lebih baik dibanding dengan pembelajaran tidak melibatkan masyarakat dan peserta didik memiliki pengetahuan yang semakin banyak karena tidak hanya dari guru saja tetapi juga dari tokoh masyarakat. Hal ini disebabkan proses pembelajaran dikelola untuk memungkinkan peserta didik turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu sesuai kebutuhan dan budaya masyarakat.

Makna pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat (*Community Based Learning*) adalah timbulnya kesadaran bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik ibadah bila tiba saatnya waktu shalat tanpa disuruh oleh guru, ini adalah buah dari kebiasaan yang berulang-ulang yang dilaksanakan peserta didik sehingga berubah menjadi sebuah kesadaran, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan menghasilkan perubahan dalam individu, karena interaksi individu dengan lingkungannya yang memenuhi kebutuhan dan memungkinkan individu untuk lebih mampu menghadapi lingkungannya.

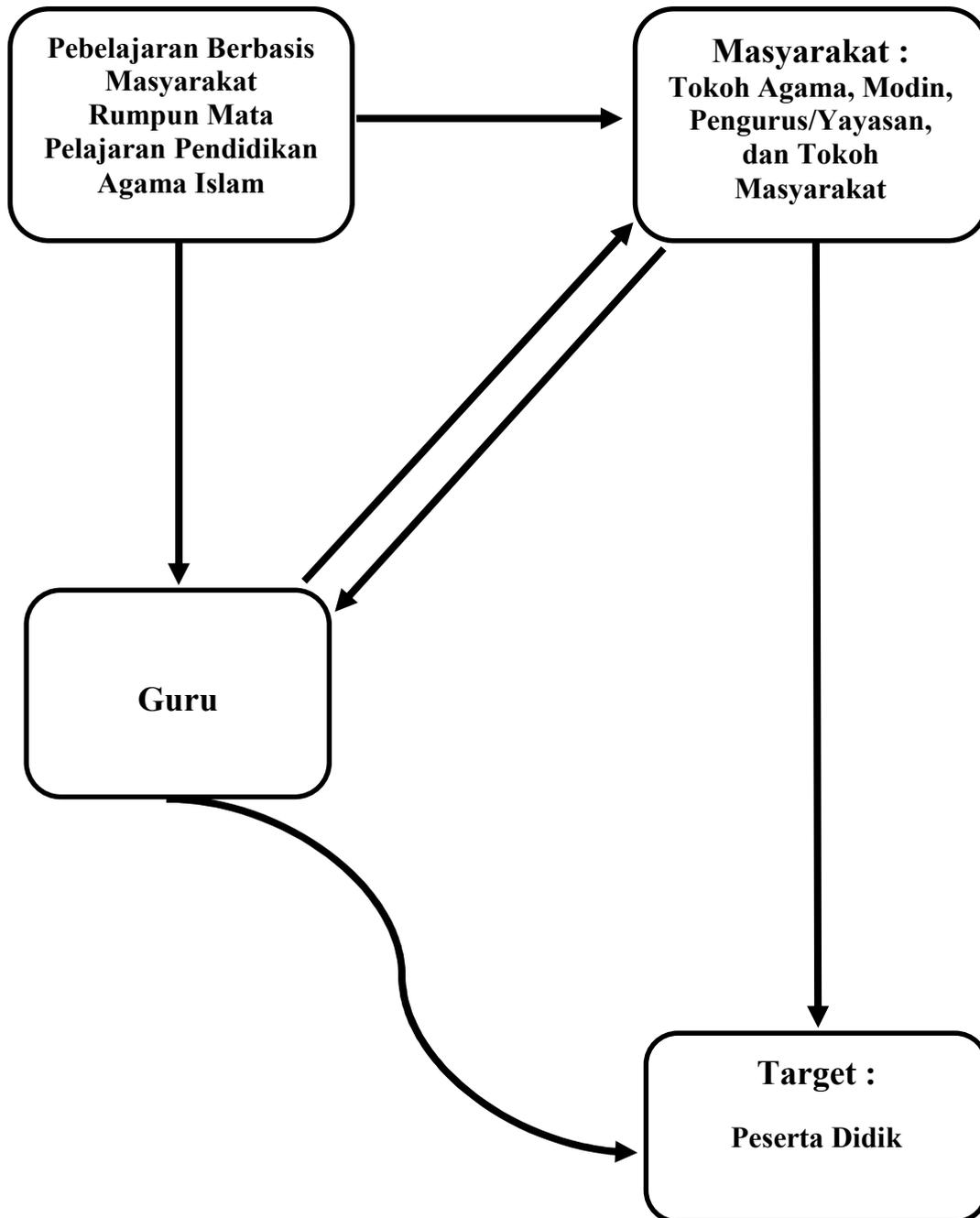
Pembelajaran berbasis masyarakat sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat, peserta didik

memperoleh pengalaman tentang penerapan materi secara langsung dari masyarakat, yang belum tentu diperoleh melalui gurunya. Masyarakat sekitar madrasah mengetahui proses pembelajaran yang dilangsungkan dan bisa memberikan masukan. Hal ini sejalan asas pembelajaran berbasis masyarakat sebagai kumpulan pengajaran/strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mempelajari apa yang ingin pelajari dari semua segmen masyarakat. Pembelajaran berbasis masyarakat menyediakan peserta didik mengidentifikasi apa yang ingin pelajari dan terbuka sumber daya yang tidak terbatas untuk mendukung penguasaan materi pelajaran peserta didik.

Makna dari pelaksanaan pembelajaran berbasis masyarakat, di mana peserta didik akan semakin sadar untuk melaksanakan ajaran Islam dan fasih dalam membaca al-Quran. Hal ini merupakan perubahan perilaku peserta didik setelah dibiasakan oleh pihak sekolah dan akhirnya tumbuh kesadaran dalam diri peserta didik. Pembelajaran adalah aksi atau proses di mana perilaku berubah, pengetahuan, keahlian dan sikap yang diperoleh.

Pembelajaran berbasis masyarakat sangat membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi materi Fiqh dan al-Quran Hadits, semakin tertarik untuk melaksanakan pembelajaran berbasis masyarakat yang lebih baik, penguasaan kompetensi peserta didik diharapkan lebih baik dibanding dengan pembelajaran tidak melibatkan masyarakat, hal ini karena masyarakat turut berperan dalam pembelajaran. Konsep ini menunjukkan pembelajaran mengacu pada kemahiran penguasaan pada apa yang telah diketahui tentang sesuatu, kelanjutan dan klarifikasi pengertian dari pengalaman, proses percobaan ide yang terorganisir dan relevan dengan masalah.

Berikut ini pemaparan kerangka konseptual Penerapan pembelajaran berbasis masyarakat rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.



Gambar 1: Kerangka Konseptual Penerapan Pembelajaran Berbasis Masyarakat (*Community Based Learning*) Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.